

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

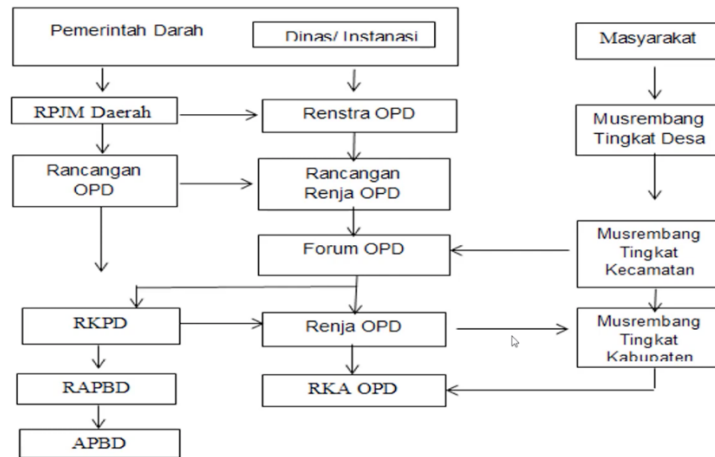
Perencanaan pembangunan sebagai bagian dari tugas pemerintah daerah merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur pemangku kebijakan dan mencakup serangkaian kegiatan. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai sasaran pembangunan di tingkat regional dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau kemudian disingkat Bappeda memiliki peran yang signifikan dalam proses perencanaan daerah. Bappeda merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di pemerintah daerah dan memiliki fungsi sebagai penunjang pemerintah di bidang perencanaan pembangunan.

Satuan kerja yang mempunyai tupoksi dalam bidang perencanaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ialah Bappeda DIY. Pelibatan institusi lain maupun dengan masyarakat pada daerah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan. Partisipasi yang aktif ini menjadi pedoman untuk menciptakan dokumen perencanaan pembangunan yang terbagi menjadi beberapa jangka waktu, yaitu jangka panjang, menengah, dan tahunan. Jika dilihat dari proses yang kompleks tidak jarang ditemukan berbagai faktor penghambat ataupun faktor pendukung keberjalanan fungsi perencanaan pembangunan di DIY.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta diakui sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan dalam pelaksanaan tata pemerintahan. Kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut diantaranya adalah urusan tata cara pengisian jabatan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertahanan; dan tata ruang. Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, Gubernur DIY dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono, sementara Wakil Gubernur dijabat oleh Adipati Paku Alam. Mereka ditetapkan bukan melalui pemilihan umum seperti yang umumnya dilakukan di daerah-daerah lain. Tujuan dari adanya regulasi tentang Keistimewaan DIY ini adalah untuk membuat pemerintahan yang sejahtera dan mempertahankan budaya Yogyakarta sebagai warisan budaya nasional.

Perencanaan pembangunan menurut Conyer dan Hills adalah suatu proses terus-menerus yang mencakup pilihan atau keputusan atas berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan (Muhammad, 2017). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan menjalankan suatu kebijakan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pelaksanaan ini melibatkan berbagai aktor yaitu instansi pemerintah, masyarakat, ataupun aktor lain di luar tersebut. Demi

terciptanya sebuah perencanaan yang baik maka integrasi pelibatan aktor tersebut perlu dilaksanakan dan dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.



**Gambar 1. 1 Proses Perencanaan Pembangunan Daerah**  
(Sumber : <https://jdih.bappenas.go.id/> )

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RKPD (Rancangan Kerja Pemerintah Daerah) merupakan implementasi atau penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), sementara RABD (Rancangan Anggaran Belanja Daerah) merupakan penjabaran dari RKPD. Dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah mengimplementasikan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat terendah, yaitu desa, hingga ke tingkat daerah

kabupaten. Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh masukan terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Musrenbang merupakan pendekatan partisipasi secara *bottom-up* dimana masyarakat dapat menyalurkan aspirasi untuk mempengaruhi proses perencanaan daerah.

Pada era sekarang ini kegiatan pemerintahan tidak bisa terlepas dengan keberadaan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan ini tentunya melahirkan inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan bentuk efektif penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pengadopsian teknologi dan informasi ini berdampak besar dan bermanfaat bagi pelayanan kepada masyarakat secara luas. Pemanfaatan teknologi ini sejalan dengan sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan dengan jaminan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar instansi pemerintah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini mengindikasikan bahwa penerapan model *electronic government* atau *e-government* menjadi sebuah perhatian khusus oleh pemerintah.

Begitupun dalam bidang perencanaan pembangunan yang menjadi salah satu tugas pemerintah. Inovasi dan penerapan teknologi merupakan prasyarat bagi perencanaan yang lebih efektif. Saat ini, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan teknologi ini. Pemerintah daerah juga dituntut untuk secara aktif merumuskan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, akuntabel, serta transparan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal perencanaan pembangunan menerapkan prinsip *e-government* dengan menerapkan

perencanaan berbasis *e-planning*. Inovasi ini dituangkan dalam bentuk aplikasi penunjang yang membantu proses perencanaan di daerah.

*E-planing* adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penggunaan *e-planning* menjadi sangat penting dalam tahapan perencanaan mengingat seringkali dihadapkan pada ketidakkonsistenan antara pengelolaan APBD dengan tujuan yang akan dicapai. Teknologi ini diterapkan dengan tujuan meningkatkan mutu layanan masyarakat serta mempermudah koordinasi di antara lembaga pemerintahan., serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen penyelenggaraan pemerintah (Nuravita,2017).

Penerapan *e-planning* ini sesuai dengan apa yang diregulasikan pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan disusun oleh pemerintah dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah melalui sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada Bappeda DIY sendiri pemanfaatan dan inovasi perencanaan berbasis elektronik ini juga dilandasi hukum dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah Daerah, Pergub No. 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pergub No. 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Inovasi yang diadopsi oleh Bappeda DIY dalam perencanaan pembangunan ini salah satunya adalah aplikasi pembuatan JogjaPlan dan penggunaan SIPD. JogjaPlan, sebuah aplikasi yang telah dikembangkan sejak tahun 2010, dapat diakses melalui situs web sebagai sarana untuk membantu dalam penyusunan RKPD, KUA/PPAS, KUA/PPAS Perubahan, serta RKPD Perubahan tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi. Sampai sekarang sudah mengalami berbagai penyempurnaan bentuk. Keterlibatan masyarakat pun juga menjadi perhatian. Bagaimana masyarakat menjadi mudah untuk melihat, mengakses, dan mengikuti proses pembangunan di DIY. Mereka juga dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui fitur-fitur yang tersedia di situs web tersebut (Kamim,2018).

Selain JogjaPlan, Bappeda DIY dalam menjalankan pemerintahan berbasis elektronik ini menyediakan beberapa fitur antara lain dataku, geoportal, dan E-Monev. Dataku merupakan aplikasi penyedia sumber data dan menyediakan layanan informasi kajian yang dibuat oleh pemerintah daerah. Data ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun akademisi sebagai referensi untuk pengambilan keputusan ataupun penelitian. Kemudian Geoportal adalah aplikasi yang menyediakan informasi terkait data spasial dengan tujuan membangun *single base map*. Dengan aplikasi ini, masyarakat, instansi, akademisi dapat memanfaatkan data tanpa khawatir tentang keaslian dan keakuratan data. Kemudian terdapat aplikasi E-Monev sebagai upaya pengkorelasian antara desain perencanaan dengan target pencapaian yang baik.

Bappeda dalam menerapkan perencanaan berbasis elektronik ini mempunyai posisi yang sangat penting. Bappeda melakukan koordinasi dengan institusi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain untuk membuat sebuah dokumen perencanaan yang terpadu. Keberadaan penyajian data dan informasi yang mendukung ini dapat berfungsi sebagai indikator yang baik dalam mengawasi proses perencanaan. Aplikasi ini diharapkan dapat menjaga transparansi anggaran sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu bukan hanya mengawasi tetapi juga dapat memberi masukan. Melalui digitalisasi perencanaan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk turut serta dalam mengawasi potensi pelanggaran terhadap penggunaan anggaran pembangunan.

Secara keberjalanannya aplikasi ini memang berjalan dengan optimal. Buktinya berbagai penghargaan ataupun prestasi telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi DIY melalui aplikasi JogjaPlan ini. Penghargaan juara 1 Pangripta Nusantara Utama Tahun 2017 diberikan kepada JogjaPlan sebagai pengakuan atas praktik perencanaan daerah yang unggul. Selain itu, pada tahun 2015, JogjaPlan berhasil masuk dalam daftar 25 inovasi layanan publik terbaik secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). JogjaPlan juga berhasil menjadi terbaik III dalam kategori inovasi pelayanan publik tingkat provinsi se-Indonesia (Astuti, 2015).

Akan tetapi dalam proses keberjalanannya yang selalu diadakan perubahan tidak terlepas dengan faktor yang menjadi penghambat. Tentunya faktor-faktor penghambat ini harus diidentifikasi dan dilakukan sebuah evaluasi resmi

apakah memang implementasi perencanaan pembangunan berbasis e-planning telah berjalan dengan lancar dan berhasil. Bagaimana ketersediaan sumber daya serta kepemimpinan dalam menjalankan tugas perencanaan ini. Di sisi lain keterlibatan secara aktif berbagai aktor juga harus menjadi fokus perhatian. Penerapan e-planning ini dapat memberikan banyak manfaat jika hambatan-hambatan ini dikelola dengan baik dan strategi yang tepat diterapkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- A. Bagaimanakah praktik perencanaan pembangunan daerah berbasis E-Planning di Bappeda Provinsi DIY?
- B. Apa yang menjadi hambatan perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning di Bappeda Provinsi DIY?
- C. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning di Bappeda Provinsi DIY?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- A. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis E-Planning di Bappeda Provinsi DIY.
- B. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan strategi dalam implementasi sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DIY.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **A. Secara Teoritis**

- a. Diharapkan e-planning dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat secara konseptual terkait penyelenggaraan perencanaan.
- b. Dapat memberikan wawasan baru terkait dengan konsep perencanaan pembangunan terutamas E-Planning bagi pembaca dan peneliti.
- c. Serta mampu memperkaya tentang kepustakaan dalam bidang ilmu pemerintahan terutama terkait dengan perencanaan daerah.

### **B. Secara Praktis**

- a. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan ataupun pandangan terkait dengan penyelenggaraan *e-planning* di Bappeda Provinsi DIY serta mampu menambah wawasan pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan perencanaan daerah berbasis elektronik.

## **1.5 Penelitian Terdahulu**

Penulis menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian terdahulu dengan judul “JogjaPlan dan Kelompok Warga Pengawal Anggaran dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Anggalih Bayu Muh. Kamim, M. Rusmul Khandiq, dan Ichlasul Amal” tahun 2018 dalam Jurnal Pemikiran

Sosiologis Vol.V. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskripsif kualitatif untuk mengevaluasi implementasi aplikasi JogjaPlan dalam konteks perencanaan dan penganggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta dampak partisipasi Kelompok Warga Pengawal Anggaran (KWPA).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemanfaatan JogjaPlan lebih kepada transparansi yang hanya melibatkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), namun proses partisipasi masyarakat dalam praktik perencanaan penganggaran belum dilibatkan secara penuh. Proses partisipasi dalam perencanaan penganggaran melalui JogjaPlan juga sangat minim dengan indikator sedikitnya jumlah pengakses JogjaPlan.

- b. Penelitian terdahulu dengan judul “Efektivitas Penerapan Website Jogjaplan.com Pada Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Fitro Miyanto dan Sugi Rahayu” pada *Journal of public policy and Administration* Vol. VI tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi e-planning serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implemnetasi JogjaPlan oleh Bappeda DIY terbilang efektif. Faktor-faktor yang menghambat kelancaran JojgjaPlan meliputi variasi ketersediaan bandwidth di masing-masing SKPD, potensi terjadinya kesalahan manusia, dan ketergantungan

website pada koneksi internet. Sedangkan faktor pendukung efektivitas penerapan website ini adalah adanya komitmen pegawai dari level pimpinan sampai manajer, kinerja pegawai yang baik, dan respon masyarakat yang positif.

- c. Penelitian terdahulu dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Berbasis Aplikasi JogjaPlan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020”. Penelitian ini dilakukan oleh Wili Tri Wahyuni dalam skripsinya pada tahun 2021, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui partisipasi dari masyarakat melalui aplikasi JogjaPlan serta inovasi apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi JogjaPlan dapat memudahkan informasi terkait dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DIY.

- d. Penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Penerapan Sistem *E-Planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi di Badan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut) oleh Agnesya Sisilia Marit, Jhony Lumolos, dan Donald Monintja” pada Jurnal Eksekutif Vol II tahun 2015. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, dengan

tujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam penerapan *E-Planning* di Bappeda Provinsi Sulut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *E-Planning* belum optimal karena sejumlah OPD tidak mampu mengisi data sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bappeda. Sumber daya manusia SDM di Bappeda sendiri sudah dikatakan berkompeten akan tetapi SDM di OPD masih kurang sehingga terjadi hambatan ketika memasukkan data yang berakibat pada terhambatnya proses perencanaan pembangunan. Kemudian belum adanya peraturan hukum yang dapat menunjang penerapan *E-Planning* ini.

- e. Hasil penelitian terdahulu dengan judul “Penerapan *E-Planning* dalam Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar)”. Penelitian ini disusun oleh Winda Nuravita sebagai bagian dari skripsinya di Universitas Diponegoro yang diajukan pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana sistem perencanaan *E-Planning* yang diimplementasikan di Bappeda Kabupaten Blitar sekaligus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perencanaan berbasis *E-Planning* tersebut.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis fenomena di dalamnya dan nantinya dianalisis berdasarkan teori untuk memberikan sebuah solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-Planning* sendiri dapat dikatakan sudah

efektif bagi Bappeda maupun SKPD/OPD dengan bukti temuan perbedaan antara aplikasi sebelumnya yaitu sistem perencanaan Sirenda dan *E-Planning* yang semakin baik dalam kemampuan akses data dan konsisten terhadap rencana kegiatan yang ada. Adapun faktor pendukung yang mendorong penerapan *E-Planning* ini dibuat menindak lanjuti atas tuntutan pemerintah pusat, mempermudah kinerja pegawai, dan menyempurnakan sistem yang sudah ada. Sedangkan faktor penghambat keberjalanan perencanaan daerah berbasis *E-Planning* di badan tersebut ialah kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan dukungan sistem jaringan yang belum stabil.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan atau *planning* merupakan elemen penting dalam proses pelaksanaan pemerintahan. Definisi terkait dengan perencanaan ini berbeda-beda menurut pandangan para ahli. Menurut Conyer dan Hills perencanaan merupakan suatu proses kesinambungan yang mencakup pilihan atau keputusan atas berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa depan. Berdasarkan definisi di atas, berarti terdapat empat elemen dasar dalam perencanaan (*Lincoln Arsyad, 1999*) diantaranya:

1. Merencanakan berarti memilih.
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.

3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
4. Perencanaan untuk masa depan.

*Pertama*, perencanaan berarti memilih, artinya perencanaan berarti proses memilih di antara berbagai tindakan atau kegiatan sesuai dengan apa yang akan dicapai. Hal ini berarti berhubungan erat dengan pengambilan keputusan di antara opsi yang ditawarkan. *Kedua*, perencanaan didefinisikan sebagai tindakan untuk menentukan sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk mencapai tujuan tertentu. *Ketiga*, perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan berarti perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. *Keempat*, perencanaan untuk masa depan artinya perencanaan ditujukan kepada tujuan yang ingin dicapai di masa depan bukan semata-mata menjawab persoalan di masa kini.

Wedgewood-Oppeheim sebagaimana dikutip oleh Riyadi dan Deddy (2004) dalam bukunya yang berjudul *Perencanaan Pembangunan Daerah*, menyebutkan bahwa “*planning can be seen as a process whereby aims, factual evidence and assumptions are translated by a process of logical argument into appropriate policies which are intended to achieve aims*”. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dipandang sebagai sebuah proses argument logis ke dalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

George R. Terry menjelaskan bahwa “*Planning is the selecting and relating of fact and the making and using of assumptions regarding the*

*future in the visualization and formulating of proposed activities believed necessary to achieve desired result*". Ini menunjukkan bahwa perencanaan adalah proses memilih dan menghubungkan fakta-fakta, membuat dan menggunakan asumsi untuk waktu yang akan datang, dan menggambarkan dan merumuskan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan mengandung unsur-unsur pokok antara lain :

1. Fakta menjadi hal yang diperhatikan dalam menentukan berbagai asumsi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan disusun atas asumsi berdasarkan fakta atau bukti yang ada.
2. Adanya pilihan atau alternatif-alternatif dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Artinya dalam penyusunan sebuah perencanaan perlu memperhatikan aspek alternatif kegiatan.
3. Terdapat tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan melalui pelaksanaan kegiatan berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan.
4. Bersifat memprediksi langkah yang yang harus diambil untuk mengatasi kemungkinan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perencanaan.

Perencanaan menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah proses menentukan tindakan masa depan yang paling sesuai dengan melakukan pilihan tertentu,

dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya. Disebutkan dalam peraturan tersebut terkait perencanaan pembangunan yang terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

1. penyusunan rencana;
2. penetapan rencana;
3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Langkah pertama adalah membuat rencana pembangunan yang sistematis, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua adalah membuat rencana kerja untuk masing-masing jenjang pemerintahan dengan berpedoman pada rencana yang telah disiapkan. Kemudian berikutnya adalah melibatkan pihak berwenang (*stakeholder*) dan menyelaraskan rencana pembangunan untuk masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Keempat adalah membuat rancangan rencana pembangunan yang lengkap.

Kemudian, definisi terkait dengan pembangunan, para ahli memiliki pandangan yang bervariasi. Siagian (1994) mendefinisikan pembangunan sebagai “suatu upaya atau serangkaian usaha untuk melakukan pertumbuhan serta perubahan yang direncanakan dan secara sadar dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas rangka mewujudkan pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kertasmita (1994) mendefinisikan pembangunan



sebagai “suatu upaya perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Menurut Riyadi dan Bratakusuma (2003:7) *“Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan menjadi lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Perencanaan ini memanfaatkan sumber daya yang ada, dan berorientasi menyeluruh, lengkap akan tetapi tetap berpegang pada asas prioritas”*.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang memuat perumusan alternatif atau keputusan berdasarkan pada data dan fakta yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan suatu rangkaian kegiatan atau program baik berupa pembangunan fisik (materil) atau nonfisik (mental dan spiritual, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Bratakusuma,2004).

Perencanaan pembangunan berdasarkan Riyadi dan Bratakusuma (2003:7) dalam kaitannya dengan daerah sebagai sebuah area atau wilayah, maka dapat terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah yaitu : *“suatu proses perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk melakukan arah perubahan menjadi berkembang lebih baik untuk suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungan dala wilayah/daerah tertentu dengan jalan memanfaatkan brbagai sumber daya yang tersedia, dan harus*

*berorientasi menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada asas prioritas”*

Program perencanaan pemerintah daerah selalu bersifat dinamis dan keberhasilan atau kegagalan program dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor sebagaimana dikatakan Riyadi dan Bratakusuma (2004:15) yang antara lain meliputi.

1. Faktor Lingkungan

Faktor tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal meliputi bidang social, budaya, ekonomi, dan politik. Faktor eksternal biasanya datang dari wilayah tetangga atau pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional ataupun internasional. Sedangkan faktor internal datang dari dalam wilayah perencanaan sendiri.

2. Faktor Sumber Daya Manusia Perencana

Sebagai motor penggerak perencanaan, SDM perencana menjadi sangat penting dan kunci bagi berhasil tidaknya proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan yang baik akan mungkin dicapai oleh SDM yang tepat dan berkualitas yang bergantung kepada kemampuan, keahlian, keluwesan dari para perencana di samping teknik dan metode yang digunakannya.

3. Faktor Sistem yang Digunakan

Sistem perencanaan yang dimaksud di sini ialah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah sebagai

landasan perencanaan pembangunan. Hal itu bisa mencakup masalah prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahanm, dan sebagainya.

#### 4. Faktor Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Ilmu dan teknologi merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam proses perumusan kebijakan, termasuk perencanaan penggunaan iptek tidak hanya dapat dilihat dari segi peralatan yang digunakan, namun juga berbagai teknik pendekatan manajemen yang maju.

#### 5. Faktor Pendanaan

Perencanaan pembangunan harus sudah dapat diperhitungkan masalah pendanaannya. Mulai dari berapa jumlah yang dibutuhkan (anggaran), dari mana sumber pendanaanya, dan bagaimana sistem pengelolaannya. Ini penting demi efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan.

### **1.6.2 Electronic Government**

Penggunaan teknologi dalam bidang pemerintahan merupakan bentuk respon atas akselerasi perkembangan teknologi yang sekarang ini berkembang begitu pesat. Dalam perkembangan teknologi ini dalam pemerintahan melahirkan konsep yang bernama electronic government. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan ini adalah untuk menciptakan

pelayanan public dengan kualitas yang lebih baik sehingga masyarakat bisa secara langsung merasakan manfaatnya.

Berdasarkan pada *World Bank* dalam Indrajit (2006:2) mendefinisikan *E-Government* sebagai “*electronic government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions.*” Sesuai dengan pengertian tersebut Pemerintahan elektronik mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah (seperti Jaringan Area Luas, Internet, dan komputasi bergerak) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya, atau manajemen pemerintah yang lebih efisien. Manfaat yang dihasilkan dapat berupa berkurangnya korupsi, peningkatan transparansi, kenyamanan yang lebih baik, pertumbuhan pendapatan, dan/atau pengurangan biaya.

Menurut James S.L. Yong Yong (2003) memberikan definisi terkait *E-government* sebagai berikut: “*...E-government as the government’s use of technology, in particular, web based Internet applications to enhance access and delivery of government services to citizens, business partners, employees and other government entities*”. Dimana *E-government* merupakan penggunaan teknologi oleh pemerintah khususnya penggunaan

aplikasi berbasis web untuk meningkatkan akses dan pemberian layanan pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis, pegawai atau karyawan, dan badan pemerintah lainnya.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi untuk menunjang proses keberjalanan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih efektif dan efisien. *E-government* ini merupakan sebuah cara atau paradigma baru untuk melayani masyarakat terhadap informasi dan pelayanan yang lebih nyaman. Hal ini juga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam institusi pemerintahan yang lebih demokratis.

Menurut Indrajit (2002:4) terdapat manfaat dari diterapkannya *e-government* bagi suatu pemerintahan. *Pertama*, memperbaiki kualitas kinerja pemerintah terhadap pemangku kepentingan baik masyarakat ataupun swasta terutama dalam efektivitas dan efisiensi. *Kedua*, *e-government* memiliki manfaat dalam peningkatan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam penerapan *Good Corporate Governance*. *Ketiga*, pengurangan pengeluaran secara signifikan terhadap biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang oleh aktor pemerintahan. *Keempat*, dapat memberikan peluang sumber pendapatan baru kepada pemerintah untuk mendapatkan. *Kelima*, menciptakan lingkungan baru yang adaptif terhadap menjawab tantangan global.

*Keenam*, memberdayakan masyarakat sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintah.

### **1.6.3 Hambatan Perencanaan Berbasis E-Planning**

Perencanaan berbasis *E-Planning* merupakan bentuk dari perwujudan *E-Government* untuk memudahkan, mempercepat, dan mendukung secara akurat kepada pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. *E-Government* dalam implementasinya pasti akan menghadapi banyak masalah dan hambatan. Hambatan ini harus diperhatikan dalam perencanaan berbasis e-government. Untuk mencapai kesuksesan proyek *e-government*, pemerintah harus mengatasi tiga masalah dan hambatan ini, menurut Ali Rokhman dalam (Farid, 2012) yaitu: *Peopleware*, *Hardware*, dan *Organoware* :

- a. *Peopleware*. Sumber daya manusia adalah kemampuan para penyelenggara pemerintah, baik pimpinan maupun karyawan, untuk menggunakan internet. Fakta menunjukkan bahwa birokrasi masih sangat bergantung pada pihak luar untuk membangun e-government. *E-government* juga tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada interaksi dan tidak ada aktivitas yang berarti.
- b. *Hardware*, adalah bagian dari teknologi dan infrastruktur. Keterbatasan *software* dan *hardware* yang tersedia, serta sedikitnya jumlah instansi pemerintah yang terhubung ke jaringan lokal (LAN) dan global (Internet) dapat mengakibatkan pengembangan *e-government* tidak dapat berjalan lancar.

- c. *Organoware* Instansi pemerintah sering menghadapi kendala dalam aspek organisasi karena hambatan birokrasi. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOT) birokrasi yang tidak fleksibel menghambat dalam mengembangkan model pelayanan publik baru melalui *e-government*.

*E-Planning* dilakukan dalam rangka menerapkan perencanaan berbasis digital. Penerapan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik ini dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dan diperhatikan oleh sektor publik menurut Indrajit dalam (Sitokdana, 2015) mengemukakan ada tiga elemen sukses penerapan E-government yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh sungguh, yaitu : *Support, Capacity dan Value*.

a. Elemen *Support*

Pejabat publik harus memiliki keinginan atau *political will* dalam menerapkan konsep *E-Government*. Elemen dukungan yang dimaksud adalah

- 1) Disepakati bahwa kerangka *e-government* adalah bagian penting dari keberhasilan negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya. Oleh karena itu, kerangka ini harus diberi prioritas tinggi sama seperti elemen penting lainnya;
- 2) Dibangun dengan alokasi sumber daya yang jelas (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan.
- 3) Konsep e-government disosialisasikan melalui berbagai bentuk kampanye secara merata, berkelanjutan, konsisten, dan menyeluruh di kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan.

b. Elemen *Capacity*

Element *Capacity* adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian E-government terkait menjadi kenyataan. Elemen ini meliputi ketersediaan sumber daya yang cukup, infrastruktur teknologi informasi yang memadai, serta ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.

c. Elemen *Value*

Elemen ini ditinjau dari sisi tuntutan masyarakat (*demand side*), berbagai inisiatif *E-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan.

## 1.7 Operasional Konsep

1.	Perencanaan Pembangunan menurut Riyadi & Bratakusuma merupakan proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan dengan berdasar kepada data maupun fakta dilapangan yang digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian aktivitas/kegiatan. Hal ini berarti perhatian terhadap alternatif/pilihan harus dilaksanakan dalam menyusun
----	--



	<p>rencana agar sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini melibatkan pemilihan tujuan, kebijakan, prosedur dan program dari berbagai alternatif. Dengan demikian, perencanaan berkaitan dengan melihat masa depan dan melibatkan pemilihan alternatif terbaik. Proses perumusan alternatif dalam perencanaan pembangunan adalah tahap penting dalam mengembangkan rencana tindakan atau kebijakan pembangunan. Ini melibatkan identifikasi dan penilaian berbagai opsi atau alternatif tindakan yang mungkin diambil untuk mencapai tujuan perencanaan tertentu.</p>
<p>Sumber Daya Manusia Perencana</p>	<p>SDM perencana dijabarkan dalam indikator yang dapat digunakan antara lain,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a <i>Pendidikan</i>, merepresentasikan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Indikatornya dapat berupa informasi pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh pegawai meliputi SMA, S1,S2, dan S3.</li> <li>b <i>Keahlian</i>, ini meliputi <i>technical skill, human skill, conceptual skill</i>, kecakapan dalam memanfaatkan kesempatan, serta kecermatan penggunaan peralatan yang dimiliki instansi dalam mencapai tujuan.</li> <li>c <i>Pengalaman kerja</i>, dengan adanya pengalaman kerja, seseorang dapat</li> </ul>

		<p>mengembangkan secara lenih terhadap kemampuannya. Pengalaman kerja menunjukkan berapa lama waktu pegawai bekerja dengan baik.</p> <p>d <i>Capacity building</i>, sebagai proses untuk peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (<i>skills</i>), sikap (<i>attitude</i>) dan perilaku (<i>behaviour</i>) dari sumber daya manusia. Indikatornya dapat berupa apakah ada mekanisme pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas pegawai.</p>
	<p>Sistem Perencanaan</p>	<p>Sistem perencanaan terkait dengan aturan-aturan maupun kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu pemerintah daerah sebagai dasar/landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal ini bisa dijabarkan dengan indikator prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan, dan sebagainya.</p> <p>a <i>Prosedur</i>, dalam konteks sistem perencanaan mengacu pada serangkaian langkah konkret atau tindakan yang harus diikuti secara berurutan atau sesuai dengan aturan tertentu untuk mencapai tujuan perencanaan. Prosedur membantu mengatur dan</p>

		<p>mengarahkan bagaimana berbagai tahapan perencanaan dilaksanakan secara sistematis.</p> <p>b <i>Mekanisme pelaksanaan</i>, mengarahkan bagaimana rencana tindakan diimplementasikan, dan ini melibatkan berbagai tahapan dan proses untuk memastikan bahwa rencana tindakan tidak hanya dihasilkan, tetapi juga dijalankan dengan efektif dan efisien.</p> <p>c <i>Pengambilan keputusan</i>, dalam sistem perencanaan adalah tahap di mana keputusan strategis dan operasional diambil berdasarkan informasi, analisis, dan evaluasi. Pengesahan adalah tahap di mana rencana tindakan yang telah disusun melalui proses pengambilan keputusan dikonfirmasi atau disahkan oleh pihak yang berwenang.</p>
	Penerapan IT	<p>Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sumber yang penting dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Penerapan IT dalam perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditinjau dari segi peralatan yang digunakan saja namun berbagai teknik dan pendekatan manajemen yang maju.</p>

		<p>a <i>Infrastruktur IT</i>, hal ini berhubungan dengan cakupan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan dalam sistem perencanaan pembangunan. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung dan relevan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perencanaan.</p> <p>b <i>Manajemen platform</i>, terkait dengan sejauh mana pemerintah atau entitas terkait memiliki portal informasi publik atau situs web yang memungkinkan akses publik ke dokumen perencanaan, data, dan informasi terkait pembangunan. Lalu sistem yang mengelola data perencanaan, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data secara efisien. Ini mencakup basis data perencanaan dan alat untuk mengakses data.</p>
--	--	---

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Menurut Widi (2010:84) “Penelitian deskriptif adalah suatu

penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) yang kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.”

Dengan jenis penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian. Menurut Creswell (2013:4) “metode kualitatif adalah metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.”

Pendekatan kualitatif ini diambil untuk menggambarkan gejala, fenomena, ataupun peristiwa yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori yang digunakan sebagai landasan sehingga dapat ditemukan pemecahan masalah sesuai dengan judul penelitian peneliti ini yaitu “Hambatan dan Strategi dalam Perencanaan Pembangunan berbasis E-Planning di Bappeda Provinsi DIY”. Penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi beserta hambatan dan strategi dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis E-Planning di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DIY.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti memilih Provinsi DIY dalam penelitian ini mengingat sekarang penerapan

perencanaan perencanaan di Provinsi DIY termasuk daerah yang baik dalam menerapkan *e-planning* sehingga menarik untuk dianalisis apa yang menjadi hambatan dalam penerapannya. Selanjutnya, dalam menggali data dat informasi, peneliti memilih situs penelitian di Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya yaitu di Jl. Malioboro, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan individu tau kelompok yang diharapkan peneliti akan menjelaskan mengenai fenomena atau kasus yang diteliti. Dalam hal ini subjek penelitiannya adalah pegawai Bappeda DIY meliputi

6. Fungsional Perencana Pertama,
7. Fungsional Perencana Muda,
8. Analis Program Pembangunan,
9. Admin/Operator E-Planning
10. Masyarakat Pengguna Aplikasi JogjaPlan

### **1.8.4 Jenis Data**

Terdapat dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan data kualitatif dalam menganalisis penelitian.

1. Data kualitatif

Data kualitatif adalah jenis data yang ditulis dalam kata-kata bukan dalam bentuk angka, dan yang termasuk dalam penelitian ini sebagai gambaran umum objek penelitian.

## 2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang terdiri dari informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur atau dihitung secara langsung.

### **1.8.5 Sumber Data**

Pada umumnya sumber data terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui informasi yang diperoleh dari narasumber. Peneliti memperoleh informasi dan data secara langsung melalui wawancara terhadap masalah yang diteliti oleh informan.

#### 2. Data sekunder

Data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data disebut sumber sekunder. Sumber sekunder dapat berasal dari dokumen sekolah, buku, majalah, jurnal, internet, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini digunakan sebagai penunjang dari data primer.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan” (Sugiyono: 2010). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara;

#### **1. Wawancara**

Untuk melakukan wawancara ini, peneliti dapat melakukan wawancara secara pribadi dengan para partisipan. Tentu saja, wawancara seperti ini dilakukan dengan adanya pertanyaan yang dibuat, baik secara terstruktur yang berarti peneliti harus membutuhkan apa saja pertanyaan yang akan disusun secara sistematis, semiterstruktur yang berarti peneliti harus mendengarkan secara seksama dan mencari informasi penting dari informan atau tidak terstruktur.

#### **2. Dokumentasi dan Studi Pustaka**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat dapat diperoleh melalui informasi tentang penerapan E-Plananning dari gambar atau foto maupun dokumen dalam bentuk tertulis atau elektronik, karya tulis akademik, atau catatan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode pengumpulan data ini dianggap sebagai data sekunder yang akan menjadi pendukung data primer yang terkumpul.



Dengan metode pengumpulan data ini informasi dapat diperoleh dari sumber tertulis pada informan maupun instansi terkait dengan implementasi sistem *E-Plannig* untuk melihat sejauh mana implementasinya serta hambatan dan strategi keberjalanan perencanaan pembangunan daerah berbasis E-Planning.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistemik agar mempermudah peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan sumber data. Miles, Huberman dan Saldana (2014:8) menjelaskan bahwa alur dalam menganalisis data terdiri dari:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah istilah yang mengacu pada proses di mana data yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih, disederhanakan, disimpan, dan/atau diubah. Fungsi dari tahap ini adalah untuk penajaman, penggolongan, atau pembuangan data yang tidak diperlukan sehingga dapat ditarik sebuah interpretasi. Dalam penelitian ini data yang dicari benar-benar data yang valid dan bisa diandalkan kebenarannya, jika terasa belum absah maka akan dilakukan pengecekan ulang oleh informan yang dipercaya.

Reduksi data merupakan proses analisis untuk menajamkan, mengarahkan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak diperlukan tadi untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan dapat diverifikasi.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu tahap untuk menyajikan atau menampilkan data yang telah terkumpul dan teranalisis pada tahap sebelumnya. Penyajian data dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang telah dikumpulkan menjadi susunan yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan dan diambil sebuah tindakan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian data yang tepat merupakan cara untuk memperoleh analisis kualitatif yang valid. Selain itu penyajian data dengan bentuk bagan ataupun jejaring dilakukan dalam penelitian ini dengan bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan membuat rencana tindakan yang akan dilakukan ke depan.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Selama tahap pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dan makna objek, keterangan atau penjelasan, sebab-akibat, dan proposisi. Kemudian peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang kuat.

Langkah verifikasi yang dilakukan masih terbuka dari masukan data. Dalam penelitian ini, verifikasi data dilakukan dengan cara mengecek representativitas data, mengecek data dari pengaruh peneliti,

mengecek melalui triangulasi (pengecekan Kembali terhadap data-data yang diperoleh melalui pengamatan yang sudah dilakukan), mencoba pembobotan bukti dari sumber-sumber data yang dapat dipercaya, dan kemudian membuat perbandingan atau mengkotraskan data. Dengan dilakukanya konfirmasi verifikasi data dengan cara tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi dan data yang mendukung tujuan penelitian.